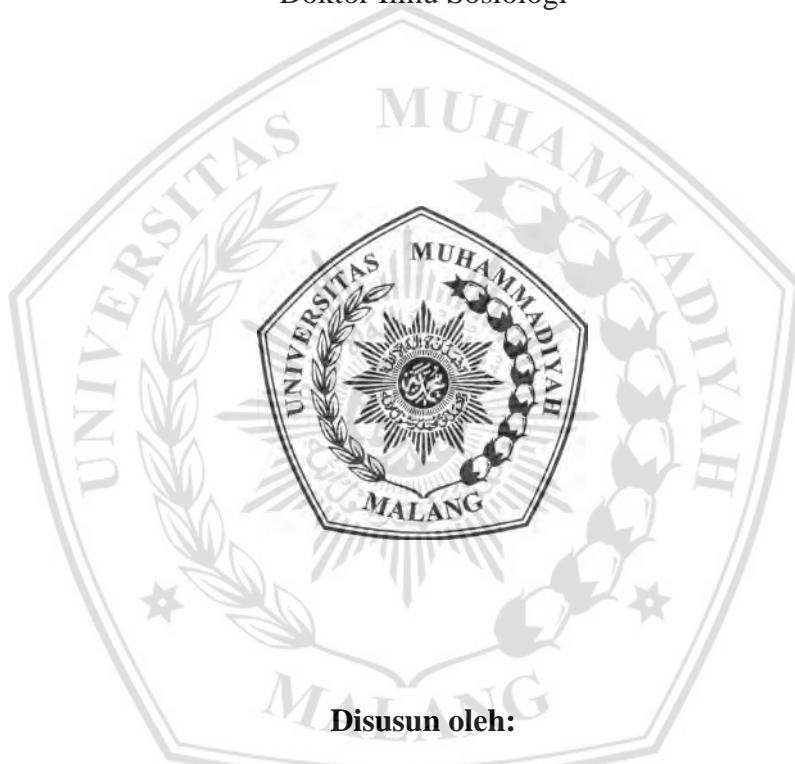


KORUPSI BIROKRASI

(Studi Fenomenologi Aktor Fungsional dalam *Negotiated Order* di Kota Palun)

DISERTASI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-3
Doktor Ilmu Sosiologi



Disusun oleh:

**INSYIRA YUSDIAWAN AZHAR
NIM 202010670111003**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

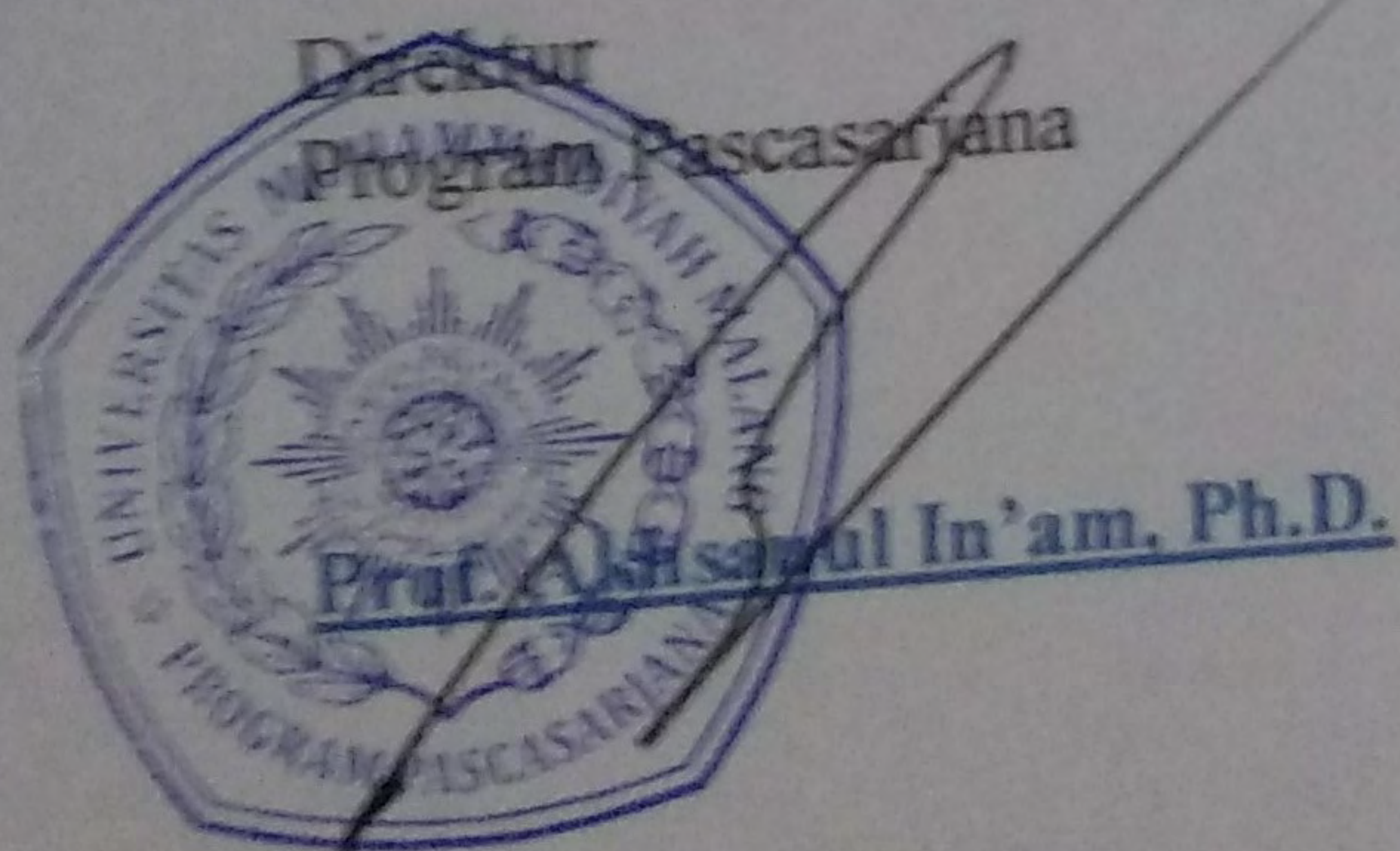
**KORUPSI BIROKRASI (Studi Fenomenologi Aktor Fungsional dalam
Negotiated Order di Kota Palun)**

INSYIRA YUSDIAWAN AZHAR

202010670111003



Promotor : Prof. Dr. Ishomuddin
Ko-Promotor I : Prof. Dr. Oman Sukmana
Ko-Promotor II : Dr. Ferry Irawan Febriansyah



Ketua Program Studi
Doktor Sosiologi

Prof. Dr. Oman Sukmana

DAFTAR PENGUJI

Disertasi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dalam forum Ujian Terbuka pada hari/tanggal, **Sabtu/ 03 Juni 2023**



DEWAN PENGUJI :

- 1. Prof. Dr. Ishomuddin (Promotor)**
- 2. Prof. Dr. Oman Sukmana (Ko. Promotor I)**
- 3. Dr. Ferry Irawan Febriansyah (Ko Promotor II)**
- 4. Prof. Akhsanul In'am, Ph.D (Penguji)**
- 5. Assc. Prof. Dr. Wahyudi (Penguji)**
- 6. Assc. Prof. Dr. Asep Nurjaman (Penguji)**
- 7. Dr. Ahmad Habib (Penguji)**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : **INSYIRA YUSDIAWAN AZHAR**
NIM : **202010670111003**
Program Studi : **Doktor Sosiologi**

Dengan ini menyatakan dengan **KORUPSI BIROKRASI (Studi Fenomenologi Aktor Fungsional dalam Melakukan Negotiated Order di Kota Palun)**. Adalah karya saya dan dalam naskah Disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Disertasi ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Disertasi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 3 Juni 2023

ng menyatakan,



INSYIRA YUSDIAWAN AZHAR

KATA PENGANTAR

Diskursus mengenai korupsi birokrasi berakhir pada perdebatan tidak lagi pada level teoritik, tetapi sudah pada tingkatan paradigmatik. Apabila kita melihat banyaknya jurnal internasional maupun berbagai kajian yang membahas mengenai korupsi birokrasi, alur kajian cenderung dominan pada level makro dan nilai-nilai diluar individu yang berpengaruh kuat untuk melakukan tindakan korupsi birokrasi. Namun menariknya banyak pakar maupun praktisi ketika ditanya oleh para *host* pada berbagai tayangan di televisi berpendapat bahwa aktivitas korupsi merujuk sebagai tindakan individu aktor itu sendiri dan tidak ada yang mengklaim bahwa itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan atas dasar nilai tertentu diluar dari diri seorang individu yang menjadi keyakinan bersama atau kelompok. Disinilah titik awal mula bagaimana diskusi mengenai korupsi birokrasi terdapat dua alur paradigma yang berbeda.

Disertasi ini awalnya bercerita bahwa terdapat kecenderungan secara sosial di masyarakat yang menganggap fenomena korupsi di segala bentuknya merupakan fenomena budaya, sehingga muncul istilah “budaya korupsi”. Penyebutan istilah yang masih belum secara paten secara ilmiah tersebut seolah menjadi suatu kebiasaan yang telah mapan bahkan diyakini sebagai sesuatu yang melekat pada tubuh birokrasi. Tetapi penggunaan istilah tersebut bukanlah sesuatu yang berlebihan mengingat banyak masyarakat yang kecewa terhadap perilaku birokrasi yang terkena kasus korupsi maupun pengalaman mereka ketika berhadapan dengan birokrasi yang benar-benar korup. Tetapi yang menjadi pertanyaan kritisnya adalah apakah budaya korupsi itu benar-benar ada? apakah tepat mengidentikkan segelintir kasus korupsi yang dilakukan oleh beberapa individu sebagai suatu budaya?

Kajian yang dilakukan oleh Barr & Serra (2010) kepada mahasiswa Oxford yang berasal dari luar Inggris ternyata tidak dapat membuktikan eksistensi pengaruh budaya lokal atas tindakan korup yang dilakukan individu. Beberapa kajian lain secara makro yang dilakukan oleh berbagai pakar berusaha mempertahankan tesis makro mereka terhadap tindakan individu dalam melakukan tindakan korup. Masalahnya adalah eksistensi perbuatan korup yang dilakukan oleh para birokrat

tidak mampu menjawab pertanyaan mengapa para aktor berbuat demikian? dan bagaimana tindakan itu dilakukan? Tentu pertanyaan yang terlihat sederhana tersebut membutuhkan jawaban yang mendalam tetapi mampu melengkapi puzzle dalam studi pembahasan korupsi birokrasi. Beberapa pertanyaan yang dibangun secara mendalam tentu tidak dapat dilakukan pada studi makro karena terdapat situasi yang tidak dapat dijawab menggunakan analisis berbasis data yang general.

Disertasi ini memberikan sumbangsih pemikiran baru terkait pembahasan korupsi birokrasi secara mikro sekaligus memberikan angin segar dengan membuka pandangan dari paradigma yang berbeda. Pembahasan secara mikro memung kinkan kita menyelami dunia kehidupan para aktor ketika dihadapkan dengan sejumlah pengalaman mereka bekerja di birokrasi selama beberapa tahun dan keresahan apa yang mereka hadapi. Kajian ini menggunakan jenis kajian fenomenologi untuk melihat pengalaman para aktor dalam membentuk tindakan dan makna. Metode penelusuran dalam fenomenologi meskipun terdapat pandangan antara Husserl dan Schutz, namun penelusuran terhadap dunia kehidupan dan sikap natural menjadi modal utama dalam melakukan penelusuran tindakan sosial para aktor. Tindakan para aktor ternyata bukan disebabkan karena suatu nilai atau budaya yang mempengaruhi mereka, ataupun kerusakan moral didalam diri mereka, akan tetapi disebabkan karena berbagai faktor mulai dari regulasi yang tidak sesuai dengan implementasi, adanya negosiasi para pimpinan, serta keterdesakan situasi yang menghendaki program birokrasi menjadi bagian dari program politik.

Disertasi ini setidaknya memiliki empat poin utama kajian. Pertama, membahas mengenai dinamika internal birokrasi termasuk berbagai permasalahan yang dialami oleh aktor birokrasi. Kedua, munculnya *negotiated order* sebagai suatu tatanan informal yang menggantikan tatanan formal dalam skema pengaturan anggaran secara ilegal. Ketiga, mengulas alasan aktor memilih untuk ikut terlibat dalam skema pengaturan anggaran. Keempat, perdebatan antara fenomenologi klasik dan fenomenologi baru ketika mengkaji kasus ini.

Secara teoritik, beban kajian tulisan ini terletak pada poin *negotiated order* dan perdebatan fenomenologi. Kajian ini menarik untuk dibaca dan dikritik kembali

karena berusaha menantang cara berpikir Strauss yang menghapus peran struktur dalam negosiasi pembentukan tatanan. Setidaknya ketidakdinamisan berpikir Strauss tidak mengubah kedudukan teori ini yang masih berada pada bagian dari interaksionis. Namun dua proposisi tambahan akan hadirnya simbol dan kesepakatan tanpa negosiasi menjadi bagian dari negosiasi adalah hal yang perlu ditambahkan bahkan dapat diadopsi kedalam kajian lain.

Sedangkan pada perdebatan fenomenologi antara fenomenologi klasik dan baru merupakan analisis yang jarang ditemukan pada berbagai tulisan yang mengkaji fenomena yang sama tetapi dihadirkan pada kajian ini. Perdebatan tersebut tidak lepas dari sudut pandang yang berbeda antara Husserl, Schutz, dan Schmitz dalam fenomena yang sama sekaligus melihat dari sisi metodologi siapa yang paling dinamis untuk digunakan. Meskipun Schmitz berhasil mengembangkan metodologi baru berdasarkan apriori sosial, tetapi konteks kesadaran aktor yang menjadi landasan metodologi fenomenologi klasik masih lebih dapat diterapkan termasuk dalam kajian ini.

Bagaimanapun kajian ini tetap memiliki keterbatasan dan dapat menjadi suatu diskursus dalam kajian *negotiated order* terutama pada kasus korupsi birokrasi. Harapannya kajian ini dapat memicu peneliti lain untuk membuat suatu karya berupa kritik atau menambah proposisi baru dalam teori Strauss. Adanya disertasi ini juga harapannya dapat memicu kajian lain dengan tema korupsi birokrasi pada level mikro.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah pada akhirnya disertasi ini berhasil diterbitkan dan dibaca oleh masyarakat luas terutama dari kalangan akademisi atau sesama peneliti. Adanya disertasi ini tidak lepas dari beberapa orang yang telah membantu mulai dari awal hingga riset ini selesai. Pihak pertama yang pantas mendapat ucapan terima kasih adalah tim promotor yang terdiri dari ketua tim promotor yaitu Prof. Dr. Ishomuddin, co promotor 1 Prof. Dr. Oman Sukmana, dan co promotor 2 yaitu Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum. yang telah memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun kajian ini.

Kemudian ayahanda Dr. Jusuf Harsono, M.Si sekaligus lawan debat ketika menyusun hasil kajian, dan ibunda saya Dyah Sri Pudjowati, S.Sos yang telah memberikan *support* dan motivasi selama pendidikan dari S1-S3. Saya berterima kasih juga pada istri tercinta Dessy Elva Listianti, S.K.M. yang selalu mensupport dan sabar ketika menempuh studi S3, dan anak pertama kami Tsauqifatussyiza Nauvalyn Azzahra yang selalu memberikan senyum kegembiraan kepada keluarga kecil kami. Kemudian kakak kandung Lukmannul Hakim, S.Ikom dan keluarga.

Beberapa rekan kerja sekaligus mentor dan lawan diskusi ketika penyusunan kajian ini yaitu Dr. Slamet Santoso, M.Si, Dr. Dian Suluh Kusuma Dewi, M.AP, Dr. Robby Darwis Nasution, M.A., dan Yusuf Adam Hilman, M.Si yang selalu memberikan masukan baik perdebatan teoritik hingga metode kajian sehingga karya ini bisa menjadi salah satu *master piece*. Kemudian beberapa rekan kerja lain para senior di Fisip seperti Bu Dwiana Binti Yulianti, M.Pd, Pak Dekan Ayub Dwi Anggoro, Ph.D, rekan-rekan kerja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tetapi juga selalu memberikan *support* untuk segera menyelesaikan salah satu pekerjaan berat ini.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan proposisi dari teori *negotiated order* milik Strauss dengan menganalisis fenomena korupsi birokrasi di salah satu kota di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian fenomenologi untuk menelusuri secara mikro bagaimana pengalaman beberapa birokrat yang terlibat dalam tindakan korupsi birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data menggunakan wawancara dengan teknik penentuan informan menggunakan *snowball*. Hasil penelitian ini memiliki dua poin utama yaitu pengembangan teori *negotiated order* dan kajian metodologis dari fenomenologi klasik dan baru. Pada poin pertama, bahwa perubahan tatanan negosiasi antara birokrat fungsional memiliki bahasa simbol yang menjadi bahasa interaksi yang digunakan. Selain itu adanya struktur ternyata masih memiliki peran meskipun tidak dominan dalam aksi perubahan tatanan. Penelitian ini juga menjawab tantangan dari beberapa kritik terhadap teori *negotiated order* dan telah berhasil menunjukkan bahwa adanya tatanan yang dilakukan tanpa melalui negosiasi sebenarnya merupakan bagian dari berjalannya negosiasi selanjutnya. Sehingga perubahan tatanan antara satu dengan yang lain terjadi kesinambungan. Pada poin kedua, bahwa perdebatan metodologis fenomenologi klasik dan baru menunjukkan bahwa metodologi yang dibangun oleh Husserl dan Schutz yang berlandaskan pada kesadaran aktor lebih dinamis digunakan dibandingkan Schmitz yang berlandaskan *priori sosial*. Hal ini bisa dilihat bagaimana aktor dalam menceritakan pengalamannya mengenai tindakan penyelewengan lebih dilatarbelakangi oleh faktor dunia kehidupan dan sikap alamiah aktor dibandingkan situasi dan kondisi sebagaimana yang digagas oleh Schmitz. Sehingga kajian metodologi fenomenologi klasik masih relevan digunakan dalam penelitian kontemporer.

Kata Kunci: Korupsi, birokrasi, tatanan negosiasi, fenomenologi

Abstract

This study aims to develop propositions of negotiated order theory by Strauss to analyzing the phenomenon of bureaucratic corruption in a city in Indonesia. This study uses a type of phenomenological research to micro level how the experiences of several bureaucrats are involved in acts of bureaucratic corruption. This study uses qualitative research methods with data collection techniques using interviews with informant determination techniques using Snowball. The results of this study have two main points, namely the development of the negotiated order theory and the methodological study of classical and new phenomenology. On the first point, changes in the negotiation arrangement between functional bureaucrats have a language of symbols which becomes the language of interaction used. In addition, the existence of a structure still has a role although it is not dominant in the action of order change. This research also answers the challenges of some of the criticisms of the negotiated order theory and has succeeded showing that the existence of an order that is carried out without going through negotiations is part of the next negotiation process. So that changes in order between one and another occur in continuity. On the second point, the methodological debate between classical and new phenomenology shows that the methodology developed by Husserl and Schutz which is based on actor awareness is more dynamically used than Schmitz which is based on social priori. This can be seen in how the actors in telling their experiences regarding acts of fraud are more motivated by life-world factors and the actors' natural attitudes compared to the situations and conditions as initiated by Schmitz. So that the study of classical phenomenological methodology is still relevant for use in contemporary research.

Key words: *corruption, bureaucracy, negotiated order, phenomenology*

DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Pertanyaan penelitian.....	12
1.3. Tujuan penelitian.....	12
1.4. Manfaat penelitian.....	13
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	13
1.4.2. Manfaat Praktis.....	13

Bab II Kajian Pustaka dan Kerangka Teori

2.1. Penelitian Terdahulu.....	15
2.2. Penegasan Istilah.....	28
2.3. Kajian Pustaka.....	29
2.4. Teori Analisis.....	34
2.4.1. Interaksionisme Simbolik.....	34
2.4.2. Fenomenologi.....	38
2.4.3. Negotiated Order Theory.....	47
2.5. Kerangka Konsep Penelitian.....	58

Bab III Metode Penelitian

3.1. Paradigma penelitian.....	60
3.2. Pendekatan penelitian.....	61
3.3. Jenis penelitian.....	62
3.4. Lokasi penelitian.....	65
3.5. Subyek penelitian.....	65
3.6. Teknik Pengambilan Data.....	66
3.7. Metode Keabsahan Data.....	66
3.8. Metode Analisis Data.....	68

Bab IV Hasil Penelitian & Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian.....	70
4.1.1. Gambaran Kondisi.....	70
4.1.2. Sumber Daya Fungsional.....	72
4.1.3. Sistem Pencairan Anggaran.....	79
4.1.4. Jenis Setoran.....	82
4.1.5. Beban Kerja.....	91

4.2. Pembahasan.....	105
4.2.1. Konteks Struktur.....	105
4.2.2. Negosiasi.....	113
4.2.3. Konteks Negosiasi.....	122
4.2.4. Analisis Negotiated Order.....	129
4.2.5. Makna Negosiasi bagi Pekerja Fungsional.....	137
4.2.6. Analisis Fenomenologi.....	140
4.3. Temuan & Proposisi	148

Bab V Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan.....	149
5.2. Implikasi Teori.....	152
5.2. Saran dan Rekomendasi.....	153

Daftar Pustaka.....	155
----------------------------	------------



Daftar Gambar

Gambar 2.1. Gambar Peta Literatur.....	26
Gambar 2.2. Proses Negosiasi.....	56
Gambar 2.3. Kerangka Konsep Penelitian.....	58
Gambar 3.1. Metode Validasi Data.....	67
Gambar 3.2. Metode Analisis Data.....	68
Gambar 4.1. Peta Negosiasi antara Fungsional dan Struktural.....	115

Daftar Tabel

Tabel 4.1. Pembagian Bentuk Setoran.....	123
--	-----





DAFTAR PUSTAKA

- Agostino, M. D., Levine, H., & Sabharwal, M. (2019). Gender in negotiation : Preparing public administrators for the 21st century workplace. *Journal of Public Affairs Education*, 26(1), 1–21. <https://doi.org/10.1080/15236803.2019.1579594>
- Aguilera, R. V., & Vadera, A. K. (2008). The Dark Side of Authority : Antecedents , Mechanisms , and Outcomes of Organizational Corruption. *Journal of Business Ethics*, 77(4), 431–449. <https://doi.org/10.1007/s10551-007-9358-8>
- Agur, C. (2013). Negotiated Order: The Fourth Amendment, Telephone Surveillance, and Social Interactions, 1878–1968. *Information & Culture*, 48(4), 419–447. <https://doi.org/10.7560/ic48402>
- Aina, S. (1982). Bureaucratic Corruption in The Continuing Search for Causes and Cures. *International Review of Administrative Science*, 48(1), 70–76.
- Altheide, D. L. (1988). Mediating Cutbacks in Human Services: a Case Study in the Negotiated Order. *Sociological Quarterly*, 29(3), 339–355. <https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.1988.tb01257.x>
- Andrews, J. T., & Montinola, G. R. (2004). Vote Players and the Rule of Law in Emerging Democracies. *Comparative Political Studies*, 37(1), 55–87. <https://doi.org/10.1177/0010414003260125>
- Andvig, J. C. H. R. (2006). Corruption and Fast Change. *World Development*, 34(2), 328–340. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.03.007>
- Ang, Y. Y. (2016). Beyond Weber : Conceptualizing an alternative ideal type of bureaucracy in developing contexts. *Regulations & Governance*, 11(3), 1–17. <https://doi.org/10.1111/rego.12123>
- Bagashka, T. (2014). Unpacking Corruption : The Effect of Veto Players on State Capture and Bureaucratic Corruption. *Political Research Quarterly*, 67(1), 165–180. <https://doi.org/10.1177/1065912913492584>
- Bañada-Hirèche, L., Pasquero, J., & Chanlat, J. F. (2011). Managerial Responsibility as Negotiated Order: A Social Construction Perspective. *Journal of Business Ethics*, 101(SUPPL.1), 17–31. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-1172-7>
- Balcom, S., & Arluke, A. (2015). Animal Adoption as Negotiated Order: A Comparison of Open Versus Traditional Shelter Approaches. *Anthrozoos A Multidisciplinary Journal of the Interactions of People and Animals*, 14(3), 135–150.

- Baldwin, J. D. (1986). *George Herbert Mead: A Unifying Theory for Sociology*. SAGE Publication.
- Barr, A., & Serra, D. (2010). Corruption and culture: An experimental analysis. *Journal of Public Economics*, 94(11–12), 862–869. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.07.006>
- Bechky, B. A. (2011). Making Organizational Theory Work: Institutions, Occupations, and Negotiated Orders. *Organization Science*, 22(5), 1157–1167.
- Bello et. al., A. A. (2002). Hermann schmitz, the “new phenomenology.” In *Phenomenology World-Wide*. Springer.
- Beltran, E. C., & Gonzalez, F. G. (2019). When Corruption is Cultural: Exploring Moral, Institutional, and Rule-Based Concepts of Corruption. *Boletin Mexicano De Derecho Comparado*, 52(156). <https://doi.org/10.22201/ijj.24484873e.2019.156.15155>
- Bishop, S., & Waring, J. (2016). Becoming hybrid: The negotiated order on the front line of public – private partnerships. *Human Relations*, 69(10), 1–22. <https://doi.org/10.1177/00187267166630389>
- Bourgeault, I. L., & Hirschhorn, K. (2011). Relations between Professions and Organizations: More Fully Considering the Role of the Client. *Professions and Professionalism*, 1(1), 67–86.
- Bowers, M. (2011). *Does Decertification Work? Outcome Analysis of the National Football Leagues Negotiated Order (1986-2008)*.
- Bryant, M., & Stensaker, I. (2011). The Competing Roles of Middle Management: Negotiated Order In the Context of Change. *Journal of Change Management*, 11(3), 353–373. <https://doi.org/10.1080/14697017.2011.586951>
- Callaghan, G. (2008). Evaluation and Negotiated Order. *Evaluation*, 14(4), 399–411. <https://doi.org/10.1177/1356389008095485>
- Cameron, L., Chaudhuri, A., Erkal, N., & Gangadharan, L. (2009). Propensities to engage in and punish corrupt behavior: Experimental evidence from Australia, India, Indonesia and Singapore. *Journal of Public Economics*, 93(7–8), 843–851. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2009.03.004>
- Campbell, T. (1981). *Seven Social Theories* (1st ed.). Oxford University Press.
- Care, I., Reeves, S., Rice, K., Conn, L. G., Miller, K., Kenaszchuk, C., & Zwarenstein, M. (2009). Interprofessional interaction, negotiation and non-negotiation on general internal medicine wards. *Journal of Interprofessional Care*, 23(November), 633–645. <https://doi.org/10.3109/13561820902886295>
- Carrington, P. J. (1979). Schutz on transcendental intersubjectivity in Husserl. *Human Studies*, 2(1), 95–110. <https://doi.org/10.1007/BF02127219>

- Chua, C. E. H., & Myers, M. D. (2018). Social control in information systems development: a negotiated order perspective. *Journal of Information Technology*, 33(3), 173–187. <https://doi.org/10.1057/s41265-017-0048-4>
- Clegg, S. (2014). Frameworks of Power. In *Sage Publication*. SAGE Publication. <https://doi.org/10.4135/9781446279267>
- Cornforth, C., & Macmillan, R. (2016). Evolution in Board Chair – CEO Relationships : A Negotiated Order Perspective. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 45(5), 1–22. <https://doi.org/10.1177/0899764015622705>
- Costelloe, T. M. (1996). Between the Subject and Sociology: Alfred Schutz ' s Phenomenology of the Life-World w. *Human Studies*, 19, 247–266.
- Creswell, J. W. (2014a). *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Fourth Edi). SAGE Publication.
- Creswell, J. W. (2014b). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publication.
- Dahlström, C., Lapuente, V., & Teorell, J. (2009). Bureaucracy , Politics and Corruption. *Annual Meeting of the American Political Science Association*, 1–47.
- Dalton, B. M. (2005). Corruption in cultural context: Contradictions within the Korean tradition. *Crime, Law and Social Change*, 43(4–5), 237–262. <https://doi.org/10.1007/s10611-005-1902-9>
- Day, R., & Day, J. V. (1977). A Review of the Current State of Negotiated Order Theory : an Appreciation and a Critique *. *The Sociological Quarterly*, 18(Winter), 126–142.
- Dokko, G. (2012). Keeping Steady as She Goes: A Negotiated Order Perspective on Technological Evolution. *Organization Studies*, 33(5–6), 681–703.
- Dreher, J. (2009). Phenomenology of Friendship: Construction and Constitution of an Existential Social Relationship. *Human Studies*, 32(4), 401–417. <https://doi.org/10.1007/s10746-009-9130-4>
- Drugov, M. (2010). Competition in bureaucracy and corruption ☆. *Journal of Development Economics*, 92(2), 107–114. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2009.02.004>
- Ehrlich, I., Lui, F. T., Journal, S., December, N. S., & Lui, F. T. (2015). Bureaucratic Corruption and Endogenous Economic Growth Isaac Ehrlich. *Journal of Political and Economy*, 107(December 1999), S270–S293.
- Evans, P., & Rauch, J. E. (1999). BUREAUCRACY AND GROWTH : A CROSS-NATIONAL ANALYSIS OF THE EFFECTS OF " WEBERIAN " STATE STRUCTURES ON ECONOMIC GROWTH *. *American Sociological Review*,

64(5), 748–765.

- Evans, T. (2007). Confidentiality in mental health services: A negotiated order? *Qualitative Social Work*, 6(2), 213–229. <https://doi.org/10.1177/1473325007077254>
- Forster, A. (2011). Evaluating the eu–asem relationship: A negotiated order approach. *Journal of European Public Policy*, 7(5), 787–805. <https://doi.org/10.1080/13501760010014957>
- Friedrich, C. J. (2002). Corruption Concepts in Historical Perspective. In *Political Corruption: Concepts and Contexts* (pp. 1–23).
- Fukuyama, F. (2013). Commentary What Is Governance? *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, 26(3), 347–368. <https://doi.org/10.1111/gove.12035>
- Giddens, A. (1995). *The Constitution of Society: The Outline of the Theory of Structuration*. Polity Press Cambridge.
- Glaser, B. G., & Strauss, A. (1964). Awareness Contexts and Social Interaction. *American Sociological Review*, 29.
- Goulding, C. (2005). Grounded theory, ethnography and phenomenology: A comparative analysis of three qualitative strategies for marketing research. *European Journal of Marketing*, 39(3-4 SPEC. ISS.), 294–308. <https://doi.org/10.1108/03090560510581782>
- Griffero, T. (2019). In a neo-phenomenological mood: Stimmungen or atmospheres? *Studi Di Estetica*, 14(2), 121–151. <https://doi.org/10.7413/18258646086>
- Gugutzer, R. (2020). Beyond Husserl and Schütz. Hermann Schmitz and Neophenomenological Sociology. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, 50(2), 184–202. <https://doi.org/10.1111/jtsb.12240>
- Hadilinatih, B. (2018). Collaborative Governance dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Enersia Publika*, 2(1), 1–12.
- Hajdu, M. (2018). Content analysis of corruption coverage: Cross-national differences and commonalities. *European Journal of Communication*, 33(1), 1–15. <https://doi.org/10.1177/0267323117750673>
- Heywood, P., & Sahling, J. H. M. (2013). DANGER ZONES OF CORRUPTION: HOW MANAGEMENT OF THE MINISTERIAL BUREAUCRACY AFFECTS CORRUPTION RISKS IN POLAND. *Public Administration and Development*, 33(3), 1–14. <https://doi.org/10.1002/pad>
- Husserl, E. (1970). *The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology*. Northwestern University Press.

- Husserl, E. (2012). *Ideas General Introduction to Pure Phenomenology*. Routledge.
- Introna, L. D., Hayes, N., & Al-hejin, Z. (2019). The Negotiated Order and Electronic Patient Record: A Sociomaterial Perspective. *Journal of Information Technology*, 34(4), 1–17. <https://doi.org/10.1177/0268396219870548>
- Kafle, N. P. (2011). Hermeneutic phenomenological research method simplified. *An Interdisciplinary Journal*, 5(1), 181–200.
- Kaspinor. (2021). Negotiated Order Dalam Politik Anggaran di Provinsi Kubumaya. In *Universitas Muhammadiyah Malang* (Issue). Universitas Muhammadiyah Malang.
- Khan, S. (2014). Qualitative Research Method - Phenomenology. *Asian Social Science*, 10(21), 298–310. <https://doi.org/10.5539/ass.v10n21p298>
- Klaveren, J. Van. (1989). The Concept of Corruption. In *Political Corruption: A Handbook*.
- Kolb, D. M. (2013). Negotiating in the Shadows of Organizations: Gender, Negotiation, and Change. *The Ohio States Journal on Dispute Resoluition*, 28(2), 241–262.
- Kuhn, T. S. (1970). *The structure of scientific revolutions*. The University of Chicago Press.
- Kurer, O. (2005). Corruption: An Alternative Approach to Definitions of Corruption: A Review. *Political Studies*, 53, 222–239.
- Lamberg, J.-A., Savage, G., & Pajunen, K. (2002). Negotiated order in inter-organizational relations: toward an institutional theory of stakeholder negotiations. *Second Conference of the European Academy of Management*. http://www.sses.com/public/events/euram/complete_tracks/corporate_governance/lamberg_pajunen_savage.pdf
- Lapsley, I., Midwinter, A., Nambiar, T., & Steccolini, I. (2011). Government budgeting, power and negotiated order. *Management Accounting Research*, 22(1), 16–25. <https://doi.org/10.1016/j.mar.2010.10.009>
- Larmour, P. (2016). Culture and Corruption. In *Interpreting Corruption*. <https://doi.org/10.21313/hawaii/9780824835149.003.0007>
- Lessig, L. (2013). “Institutional Corruption” Defined. *Journal of Law, Medicine, & Ethics*, 41(3), 553–555.
- Liberati, E. G. (2017). Separating, replacing, intersecting: The influence of context on the construction of the medical-nursing boundary. *Social Science and Medicine*, 172, 135–143. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2016.11.008>
- Lundh, L. G. (2020). Experimental Phenomenology in Mindfulness Research.

- Mindfulness*, 11(2), 493–506. <https://doi.org/10.1007/s12671-019-01274-9>
- Maines, D. R. (1982). Ethnography Studies in the Negotiated Order. *Journal of Contemporary Ethnography*, 11(3), 267–279. <https://doi.org/10.1177/089124168201100301>
- Manen, M. Van. (2017). But Is It Phenomenology? *Qualitative Health Research*, 27(6), 775–779. <https://doi.org/10.1177/1049732317699570>
- Manning, S. (2004). Public Private Partnership als „Negotiated Order“ —. *Berliner Journal Für Soziologie*, 14(1), 95–112. <https://doi.org/10.1007/bf03204698>
- Mbaku, J. M. (1992). Bureaucratic Corruption in Africa : The Futility of Cleanups. *The Cato Journal*, 16(1), 1–17.
- Mead, G. H., & Miller, D. L. (1982). *The Individual and The Social Self: Unpublished Work of George Herbert Mead*. University of Chicago Press.
- Medved, C. E., & Heisler, J. (2002). A Negotiated Order Exploration of Critical Student-Faculty Interactions: Students-Parents Manage Multiple Roles. *Communication Education*, 51(2), 105–120.
- Modell, S. (2006). Institutional and negotiated order perspectives on cost allocations: The case of the Swedish university sector. *European Accounting Review*, 15(2), 219–251. <https://doi.org/10.1080/09638180500252144>
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological Research Methods*. SAGE Publication.
- Nisim, S., & Benjamin, O. (2010). The Speech of Services Procurement: The Negotiated Order of Commodification and Dehumanization of Cleaning Employees. *Human Organization*, 69(3), 221–232.
- Nye, J. S. (2013). Corruption and Political Development : A Cost-Benefit Analysis All use subject to JSTOR Terms and Conditions CORRUPTION AND POLITICAL DEVELOPMENT: A COST-BENEFIT ANALYSIS *. *The American Political Review*, 61(2), 417–427.
- Oliveros, V., & Schuster, C. (2017). Merit , Tenure , and Bureaucratic Behavior : Evidence From a Conjoint Experiment in the Dominican Republic. *Comparative Political Studies*, 51(6), 1–34. <https://doi.org/10.1177/0010414017710268>
- Olsen, J. P. (2005). Maybe It Is Time to Rediscover Bureaucracy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 16(1), 1–24. <https://doi.org/10.1093/jopart/mui027>
- Parhankangas, A., Ing, D., Hawk, D. L., Dane, G., & Kosits, M. (2004). Negotiated order in organizations in the network form. *Proceedings of the 3rd International Conference on Systems Thinking in Management*.
- Poloma, M. M. (2010). *Sosiologi Kontemporer*. PT. Raja Grafindo Persada.

- Pratama, P. E., Kamil, M., & Salahudin, S. (2019). Implementation of the Integrity Zone Development Program towards a Corruption-Free Area and a Serving Clean Bureaucracy Region. *Journal of Local Government Issues*, 2(2), 134. <https://doi.org/10.22219/logos.vol2.no2.134-148>
- Rahbek, E., & Pedersen, G. (2011). Determinants of lean success and failure in the Danish public sector. *International Journal of Public Sector Management*, 24(5), 403–420. <https://doi.org/10.1108/09513551111147141>
- Ritchie, J., & Lewis, J. (2003). *Qualitative Research Practice A Guide for Social Science Students and Researchers*. SAGE Publication. [https://doi.org/10.21511/ppm.14\(4-1\).2016.04](https://doi.org/10.21511/ppm.14(4-1).2016.04)
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2004). *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klsik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Kreasi Wacana.
- Ritzer, George. (1992). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda (terj.)* (2nd ed.). Rajawali Pers.
- Salahudin, Nurmandi, A., Qodir, Z., Jubba, H., & Mutiarin, D. (2020). ELITE CAPTURE OF BUDGET CORRUPTION. *Public Policy and Administration*, 19(2), 340–353. <https://doi.org/10.13165/VPA-20-19-2-14>
- Salahudin, S., Nurmandi, A., & Loilatu, M. J. (2020). How to Design Qualitative Research with NVivo 12 Plus for Local Government Corruption Issues in Indonesia? *Jurnal Studi Pemerintahan*, 11(3). <https://doi.org/10.18196/jgp.113124>
- Schmitz, H. (2011). Der Leib. In *Der Leib*. De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110250992>
- Schmitz, H., Müllan, R. O., & Slaby, J. (2011). Emotions outside the box-the new phenomenology of feeling and corporeality. *Phenomenology and the Cognitive Sciences*, 10(2), 241–259. <https://doi.org/10.1007/s11097-011-9195-1>
- Scholl, W., & Schermuly, C. C. (2018). The Impact of Culture on Corruption, Gross Domestic Product, and Human Development. *Journal of Business Ethics*, 162(1), 171–189. <https://doi.org/10.1007/s10551-018-3977-0>
- Schutz, A. (1970). The Problem of Transcendental Intersubjectivity in Husserl. In *Collected Papers III*.
- Scott, S. (2009). Re-clothing the Emperor: The Swimming Pool as a Negotiated Order. *Symbolic Interaction*, 32(2), 123–145. <https://doi.org/10.1525/si.2009.32.2.123>
- Seleim, A., & Bontis, N. (2009). The relationship between culture and corruption: A cross-national study. *Journal of Intellectual Capital*, 10(1), 165–184. <https://doi.org/10.1108/14691930910922978>

- Stamato, L. (1991). Book Review: Toward a Process Pneumatology. In *Negotiation Journal* (Vol. 52, Issue 1). <https://doi.org/10.1177/004056399105200126>
- Starks, H., & Trinidad, S. B. (2007). Choose Your Method: A Comparison of Phenomenology, Discourse Analysis, and Grounded Theory. *Qualitative Health Research*, 17(10), 1372–1380. <https://doi.org/10.1177/1049732307307031>
- Strauss, A. (1978). *Negotiations. Contexts, Processes, and Social Order*.
- Strauss, A. L. (1993). *Continual Permutations of Action*. Aldine De Gruyter.
- Strauss, A., Schatzman, L., Ehrlich, D., Bucher, R., & Sabshin, M. (1963). The Hospital and its Negotiated Order. *The Hospital in Modern Society*, 147(169).
- Stryker, S. (1980). *Symbolic Interactionism: A Social Structural*. Benjamin-Cummings Publishing Company.
- Suddick, K. M., Cross, V., Vuoskoski, P., Galvin, K. T., & Stew, G. (2020). The Work of Hermeneutic Phenomenology. *International Journal of Qualitative Methods*, 19, 1–14. <https://doi.org/10.1177/1609406920947600>
- Sundler, A. J., Lindberg, E., Nilsson, C., & Palmér, L. (2019). Qualitative thematic analysis based on descriptive phenomenology. *Nursing Open*, 6(3), 733–739. <https://doi.org/10.1002/nop2.275>
- Thomas, W. I. (1978). *The Definition of Situation in J. Hass & W. Shaffir (Eds.) Shaping Identity in Canadian Society* (Prestice H).
- Tiwari, A. K. (2012). Corruption, democracy and bureaucracy. *Theoretical and Applied Economics*, XIX(9), 17–28.
- Tranparency International. (2020). *CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2019*. Transparency International. <https://www.transparency.org/en/cpi/2019>
- Tranparency International. (2021). *CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2020*. <https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl>
- Wang, E. H. (2021). *Frightened Mandarins: The Adverse Effects of Fighting Corruption on Local Bureaucracy **.
- Weber, M. (1968). *On Charisma and Institution Building*. University of Chicago Press.
- Wessels, B., Taylor, J., & Coates, L. (2019). Telehealth in Community Nursing: A Negotiated Order. *Sociological Research Online*, 22(4), 1–17. <https://doi.org/10.1177/1360780417734145>
- Widjojanto, B. (2016). *Berkelahi Melawan Korupsi*. Intrans Publishing.